



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. Teori Manajemen Pembiayaan

a. Pengertian Manajemen Pembiayaan

Manajemen berasal dari bahasa Prancis yaitu “ *menegement* ”¹⁰ yang artinya seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris kata “ *manage*” berarti mengendalikan atau mengelola, Manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Dengan memiliki kemampuan manajemen yang baik , setiap perusahaan dapat mengendalikan setiap orang yang berada di dalam suatu organisasi perusahaannya, sehingga tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan¹¹

Ada banyak versi mengenai definisi manajemen, namun demikian pengertian manajemen itu sendiri secara umum adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti *planning, organizing, staffing, directing, dan controlling* yang dilakukan oleh para anggota organisasi dengan menggunakan seluruh sumber daya organisasi untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang

¹⁰ Syaiful Amri, pengantar Syaiful Amri, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (sebal Literindo Kreasi : Nusa Tenggara Barat (2022),Hlm.1

sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan masyarakat luas.

Secara etimologis, pengertian manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Manajemen ini juga dilihat sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi, sebagai usaha bersama dengan beberapa orang dalam organisasi tersebut. Sehingga, ada orang yang merumuskan dan melaksanakan tindakan manajemen yang disebut dengan manajer¹²

Berikut ada beberapa pengertian tentang manajemen dari beberapa ahli.

1. Menurut James A.F. Stonner, pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi, serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Menurut Robbins dan Coulter, manajemen adalah proses pengoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Efisiensi mengacu pada memperoleh output terbesar dengan input terkecil; digambarkan sebagai “melakukan segala sesuatu secara benar.” Sedangkan, efektivitas mengacu pada menyelesaikan kegiatan-kegiatan sehingga sasaran organisasi dapat tercapai, digambarkan sebagai “melakukan segala sesuatu dengan benar.”¹³

¹² Rinawati, *Pengantar Teori manajemen organisasi dan komunikasi* (Pustaka Baru Press: Yogyakarta (2019), hlm.9

¹³ *Ibid*, hlm.10



Adapun Biaya (*Cost*) menurut Bahasa dapat di artikan pengeluaran dalam istilah ekonomi, biaya/ pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya, dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Secara teoretis, biaya adalah nilai besar dana yang perlu disediakan pada proyek kegiatan tertentu. Biaya adalah sesuatu yang harus dikeluarkan dalam mencapai keuntungan. Akan tetapi, konsep biaya tidak selalu identik dengan uang. Adapun biaya pendidikan, menurut Fali dan Supriadi¹⁴, merupakan salah satu komponen instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Biaya pendidikan mencakup semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargaikan uang).¹⁵

Menurut H.M Levin¹⁶ makna pembiayaan atau Pendanaan sekolah adalah Pendanaan sekolah mengacu pada proses perolehan pendapatan pajak dan sumber daya lainnya untuk pembentukan dan pengoperasian sekolah dasar dan menengah serta proses alokasi sumber daya tersebut ke sekolah-sekolah di berbagai wilayah geografis dan jenis serta jenjang pendidikan. Dalam implementasi nya pembiayaan pendidikan sangat menuntut kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara yranspakepada masyarakat dan pemerintah.¹⁷

¹⁴ Nurkomariah, *konsep manajemen Keuangan pendidikan* Al-Afkar: Manajemen Pendidikan ,2018) Islam <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/alafkar/publication-ethics>

¹⁵ Ara Hidayat, *Manajemen pembiayaan Pendidikan*, (Jawa Barat : Pustaka Setia, 2022) Hlm.34

¹⁶ *ibid*, hlm.35

¹⁷ Nurmadih, *kontribusi manajemen pembiayaan dan iklim madrasah terhadap peningkatan mutu pendidikan madrasah aliyah negeri di aceh utara*, (Jurnal Al madris, 2021) ,<https://journal.stajamitar.ac.id/index.php/almadaris>



Manajemen pembiayaan adalah sebuah proses dalam mengoptimalkan, mengalokasikan sumber dana dan mendistribusikannya sebagai fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran, sehingga tercipta pembelajaran yang efektif dan efisien, mulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan

Manajemen pembiayaan merupakan keputusan secara keseluruhan aktivitas mengenai usaha dalam memperoleh dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen yang menuntut agar dalam mengelola dana memperhatikan dan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas¹⁸ pelaksanaan suatu manajemen harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan manajemen pembiayaan pendidikan untuk menggali dana keuangan pendidikan dari sumber-sumber dana pendidikan, dan di pergunakan secara efektif dan efisien, serta tidak melanggar aturan. Dalam hal ini.

Tujuan manajemen pembiayaan adalah memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi, baik itu untuk kegiatan investasi, operasional, atau pendidikan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

b. Prinsip Manajemen Pembiayaan

Dalam pengelolaan dana pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan (PP No. 48 tahun 2008 pasal 59 dan undang undang no.20 tahun 2003 pasal 48)¹⁹

¹⁸Djuwariyah, *manajemen pembiayaan dalam peningkatan mutu pendidikan* (jurnal multicultural of islamic education (2021)

¹⁹ Renny Mayasari dkk, *Manajemen Keuangan dan pembiyaaan* (jurnal Sabilarrasyad Vol. III No. 02 Juli – Desember 2018)



1) Prinsip Transparansi

Transparansi, berarti adanya keterbukaan. Di lembaga pendidikan, transparan yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk Mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Di samping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh Informasi yang akurat dan memadai.

2) Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas berarti penggunaan uang sekolah dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

3) Prinsip Efektivitas

Prinsip efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Artinya Keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang di lakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan



4) Prinsip Efisiensi

Prinsip Efisiensi adalah Perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, Pikiran, waktu, dan biaya.

5) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan berarti Menuntut terwujudnya Keseimbangan individu dan masyarakat. Dalam penyusunan anggaran harus di alokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat.

c. Ruang Lingkup Dalam Manajemen Keuangan Pendidikan

Di dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi 3 hal, yaitu: *budgeting* (penyusunan anggaran), *accounting* (pembukuan), dan *auditing* (pemeriksaan)²⁰

1) *Budgeting* (penyusunan anggaran)

Menurut wahyudin u.r, istilah anggaran sering kali ditangkap sebagai pengertian suatu rencana. Namun dalam bidang pendidikan sering dijumpai dua istilah yakni rapbn (rencana anggaran pendapatan dan belanja negara) dan rapbs (rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah). Dalam dua istilah tersebut “anggaran bukanlah sebuah rencana”²¹ Istilah rencana” telah memberikan penekanan atas pemakaian istilah “anggaran ” sebagai suatu rencana. Kegiatan identifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan, menganalisis alternatif, serta membuat rekomendasi alternatif untuk mencapai sasaran tujuan pendidikan.



²⁰ Undang Ruslan Wahyudin dkk, *Manajemen pembiayaan Pendidikan* (Yogyakarta: Budi utama 2021) hlm.32

²¹ *Ibid*, hlm.33



Menurut Nanang fattah penyusunan anggaran (*budgeting*) merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan menjabarkan tujuan kedalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis *cost effectiveness*, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Kegiatan penyusunan anggaran (*budget*) pendidikan merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam lembaga kurun waktu tertentu. Perencanaan keuangan (*budgeting*) merupakan kegiatan penyusunan anggaran. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam waktu tertentu.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran (*budgeting*) adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan, menganalisis alternatif, serta membuat rekomendasi alternatif yang diwujudkan dalam rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam waktu-waktu tertentu untuk mencapai sasaran pendidikan. Dalam menentukan biaya satuan pendidikan ada dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perkomponen pendidikan yang digunakan oleh murid. Menurut Mulyana dengan mengutip pendapat Morphet dalam Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam penganggaran biaya pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi data yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil
- b) Memproses atau menganalisis data yang relevan
- c) Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan

2) *Accounting* (Pembukuan)

Kegiatan kedua dari administrasi pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan meliputi dua hal, yaitu yang pertama pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan pengurusan bendaha. Pelaksanaan (*akunting*) digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi. Pelaksanaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana dapat dikelompokkan menjadi dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. Keduanya ini harus dibukukan sesuai prosedur pengelolaan selaras dengan ketentuan atau kesepakatan bersama. Dalam hal ini yang di sebut



dengan Akuntansi, akuntansi adalah proses yang mengidentifikasi data keuangan, pencatatan, dan sebagai hasil akhirnya laporan keuangan.²²

Adapun dari proses kegiatan akuntansi adalah proses pencatatan penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu lembaga. Karena memiliki tugas yang kompleks dan menyangkut berbagai kegiatan, akuntansi harus memenuhi hal-hal berikut:

- a) mengidentifikasi data yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil;
- b) Memproses atau menganalisis data yang relevan;
- c) Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan²³

3) *Auditing* (pemeriksaan)

Auditing (pemeriksaan) adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Bagi unit-unit yang ada di dalam departemen mempertanggungjawabkan pengurusan keuangan ini melalui departemen masing-masing. Pertanggung jawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang ada beberapa jenis pemeriksaan (*audit*) keuangan yaitu pemeriksaan (*audit*) laporan keuangan, bertujuan menentukan laporan keuangan secara keseluruhan informasi yang terukur dan sudah diverifikasi, disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu; dan pemeriksaan (*audit*)



²² Ara Hidayat, *Manajemen pembiayaan Pendidikan*, (Jawa Barat : Pustaka Setia, 2022) Hlm.164

²³ *Ibid.*, hlm.165

operasional, merupakan penelaahan atas bagian dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya.

Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian barang bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Secara sederhana pengawasan terdiri dari memantau (*monitoring*), menilai dan melaporkan. Proses evaluasi ini harus dilakukan agar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan manajemen keuangan berjalan efektif dan efisien serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Dalam prosesnya, Pemeriksaan (*auditing*) adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Untuk melaksanakan audit, diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan sejumlah standar (kriteria) yang dapat digunakan sebagai pegangan pengevaluasian informasi tersebut. Agar dapat diverifikasi, informasi harus dapat diukur. Ada beberapa jenis pemeriksaan (*audit*) keuangan, pertama, pemeriksaan (*audit*) laporan keuangan, bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan merupakan informasi yang terukur dan sudah diverifikasi, disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan pemeriksaan (*auditing*) adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang, yang dilakukan



oleh seorang yang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

d. Operasionalisasi Pembiayaan Pendidikan

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mendefinisikan operasional adalah operasi yang didasarkan pada aturan. Operasi yang sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah. Secara umum operasional adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel. Atau operasional dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan yang merupakan upaya untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang maksimum dalam hal penggunaan sumber daya yang akan memberikan profit bagi pendidikan²⁴

Biaya yang didapat dari pemerintah harus digunakan sesuai dengan kebutuhan, di operasionalisasi biaya pendidikan mana dalam melakukan tentu serangkaian kegiatan yang harus dilalui, antara lain: membutuhkan

1) Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Pada sebuah organisasi atau lembaga apapun bentuk dan namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan, maka terlebih dahulu ada perencanaan. Perencanaan pada sebuah lembaga sangat esensial, karena pada kenyataannya, perencanaan memegang peranan yang lebih penting dengan fungsi fungsi lainnya, tanpa adanya perencanaan maka sulit untuk mencapai tujuan.²⁵

²⁴ Undang Ruslan Wahyudin dkk, *Manajemen pembiayaan Pendidikan* (Yogyakarta: Budi utama 2021) Hlm.110

²⁵ *Ibid.*, Hlm.114



2) Pelaksanaan pembiayaan pendidikan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Setelah perencanaan pembiayaan pendidikan selesai dan disetujui oleh semua komponen yang terlibat, dan menghasilkan sebuah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), tahapan manajemen selanjutnya yaitu pelaksanaan pembiayaan pendidikan.²⁶

3) Evaluasi pembiayaan pendidikan

Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan alat untuk mengukur dari melihat hasil rencana yang dicanangkan pada planning. Memberikan imbalan kepada staff sesuai kinerja yang ditunjukkan, dan merancang serta merencanakan kembali sambil memperbaiki hal-hal yang belum sempurna. Evaluasi pada administrasi berarti kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat bantu tertentu dalam usaha mencapai tujuan.

Mengamati tingkat efektivitas maksudnya menilai tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, apakah telah menghasilkan sesuatu seperti direncanakan atau sekurang-kurangnya, apakah kegiatan itu telah berjalan di atas *rel* yang sebenarnya dan tidak menyimpang dari perencanaan atau tujuan yang telah ditetapkan. Sedang mengamati tingkat



²⁶ Ibid, hlm.115

efisiensi maksudnya menilai Tindakan tindakan/kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan itu apakah merupakan cara yang terbaik atau paling tidak untuk mencapai hasil yang sebesar besarnya dengan risiko yang sekecil-kecilnya, yang berarti apakah cara kerja tertentu yang sudah dipergunakan mampu memberi hasil yang maksimal.²⁷

e. Tahapan Proses Manajemen Pembiayaan

Menurut Satori mengemukakan bahwa tahapan tahapan atau urutan kerja dalam manajemen pembiayaan pendidikan terdiri atas sebagai berikut²⁸:

1) Perencanaan biaya pendidikan

Perencanaan pendidikan dapat membantu para pengelola pendidikan untuk menjadi lebih berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perencanaan pendidikan dalam menolong pencapaian target atau sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu dan memberikan peluang untuk lebih mudah di kontrol dan di monitor dalam pelaksanaan nya.

2) Pengelolaan penggunaan biaya pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan yang efektif tidak terlepas dari penerapan manajemen pendidikan. Tilaar menyatakan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional apabila tidak di kelola dengan sebaik baik nya maka bukan hanya tidak efektif, melainkan juga tidak efisien, dengan dana yang masih terbatas, pengelolaan pendidikan termasuk di dalam nya peningkatan manajemen harus di laksanakan.

Pengelolaan sistem pendidikan dengan baik baiknya tidak terlepas dari sistem manajemen yang baik. di sadari bahwa manajemen merupakan



²⁷ Ibid., hlm.116

²⁸ Ara Hidayat, *Manajemen pembiayaan Pendidikan*, (Jawa Barat : Pustaka Setia, 2022) Hlm.164

serangkaian proses yang mencakup cara manajemen terlibat dalam fungsi manajemen yang ditampilkan oleh orang manajer.

3) Evaluasi, pengawasan dan pertanggung jawaban biaya pendidikan

Evaluasi atau *evaluation involves auditing* merupakan pertanggung jawaban terhadap keuangan sekolah menyangkut seluruh pengeluaran dana sekolah yang berkaitan dengan hal hal yang telah di capai sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Pengelolaan anggaran Sekolah di tuntutan untuk mempertanggungjawabkan setiap dana yang di keluarkan selama tahun anggaran. Pertanggung jawaban ini di lakukan dalam rapat dewan sekolah yang diikuti komponen sekolah.

Menurut Alvin A.Harns dan James K.Leobbec²⁹ *Auditing* (pertanggung jawaban keuangan) adalah proses yang di tempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen dalam menghimpun dan mengevaluasi bukti bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu *ententitas* (satuan) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah di tetapkan.

f. Tujuan Tata kelola Pembiyaaan

Dalam Kamus Indonesia disebutkan kata “*tata kelola*”³⁰ dibangun atas dua kata, yaitu tata dan kelola. Tata artinya aturan (biasanya dipakai dalam kata majemuk); kaidah, dan susunan; cara menyusun; sistem. Adapun kata kelola artinya mengelola mengendalikan; menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya).



²⁹Ibid, hlm.165

³⁰ Harinuridin dkk, *Tata Kelola Perusahaan Tercatat di Indonesia*, jurnal advokasi Indonesia Volume 10 Nomor 1, January – June 2022

Tata kelola biaya pendidikan adalah aktivitas pemilik dan manajemen atau pimpinan lembaga pendidikan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan cara seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Tata kelola biaya pendidikan dalam arti sempit adalah tata pembukuan. Adapun dalam arti luas, tata kelola biaya pendidikan adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Secara mikro, pengelolaan keuangan di sekolah dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan³¹

Melalui kegiatan pengelolaan keuangan, kebutuhan pendanaan kegiatan pendidikan dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program pendidikan secara efektif dan efisien. Untuk itu, tujuan pengelolaan keuangan adalah:

- 1) Mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan dana sekolah;
- 2) Mengetahui penyebab utama biaya yang terjadi di sekolah;
- 3) Memberikan informasi berupa laporan biaya yang akurat;
- 4) Memberikan jaminan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana serta pelaporannya.³²



³¹ Ara Hidayat, *Manajemen pembiayaan Pendidikan*, (Pustaka setia : Jawa barat, 2022) Hlm. 242

³² *Ibid*, hlm. 245

Tabel 2.1

Indikator Implementasi Manajemen Pembiayaan di SMP

Ma'had Tahfidz Hayatul Qur'an

No	Indikator	Sub indikator
1	<i>Budgeting</i> (Penyusunan anggaran)	- Identifikasi Tujuan - Menentukan Skala Prioritas - Tujuan yang menjadi rencana tujuan - Menganalisis berbagai alternatif - melakukan rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencari tujuan sasaran
2	<i>Acaunting</i> (Pembukuan)	- Penerimaan dana - Penyimpanan dana - Pengeluaran dana
3	<i>Auditing</i> (Pemeriksaan)	- Pemeriksaan penerimaan dana - Pemeriksaan simpanan dana - Pemeriksaan pengeluaran dana - Mengevaluasi atas prosedur biaya - Melaksanakan evaluasi - Melakukan efisiensi anggaran



2. TEORI PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

a. Pengertian Pengadaan Sarana dan Prasarana

Sebagai salah satu fungsi dari manajemen sarana dan prasarana Pengadaan merupakan fungsi yang banyak mendapat perhatian dari Masyarakat, sebab pengadaan masyarakat dengan penggunaan keuangan Negara. Untuk itu proses pengadaan harus dilakukan secara efektif, Bersaing, adil, terbuka, akuntabel, dan selektif sesuai dengan aturan dan Ketentuan yang berlaku.³³

Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks persekolahan departemen pendidikan nasional tahun 2007 menjelaskan bahwa pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. proses belajar mengajar akan semakin efektif dan efisien apabila di tunjang dengan sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Proses belajar mengajar adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dan siswa dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia untuk memperoleh hasil belajar yang optimal.

Oleh karena itu, tanpa adanya sarana dan prasarana pendidikan dapat dikatakan proses pendidikan yang kurang berarti. Karena setiap mata pelajaran mempunyai karakter yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya³⁴



³³ Syahril, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*, (Padang: SUKABINA Press, 2018), Hlm. 37

³⁴ Irwan Faturahman, *Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dalam mutu pembelajaran*, jurnal Darussalam: jurnal pendidikan, komunikasi dan pemikiran hukum Islam vol. XIII, No. I: 65-67, 2021

Depdiknas membedakan antara sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas (pralatan, pelengkap, bahan dan perabotan) yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien, seperti: gedung, ruang kelas, meja kursi serta alat-alat media pengajaran, perpustakaan, kantor sekolah, ruang osis, tempat parkir, ruang laboratorium. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah dan sebagainya. Penekanan pada pengertian tersebut ialah pada sifatnya, sarana bersifat langsung dan prasarana bersifat tidak langsung dalam proses pendidikan.³⁵

Sarana dan prasarana pendidikan adalah dua hal yang berbeda dan berbeda makna, sarana pendidikan diartikan sebagai peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta media pengajaran. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran, baik alat-alat pelajaran, perlengkapan sekolah, dan sebagainya. Sementara prasarana pendidikan adalah diartikan sebagai fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pengajaran seperti halaman



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

³⁵ Irjus Indrawan, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan* (Cahaya Firdaus : Pekanbaru (2023) hlm.73-74

b. Prosedur Pengadaan Sarana dan Prasarana

Prosedur pengadaan barang dan jasa harus mengacu kepada Kepres No 80 Tahun 2003 yang telah disempurnakan dengan Permendiknas No 24 Tahun 2007. Pada umumnya, pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan melewati prosedur sebagai berikut :

- 1) Menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana.
- 2) Mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- 3) Membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujukan Kepada pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi Sekolah swasta.
- 4) Bila disetujui maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk Mendapat persetujuan dari pihak yang dituju.
- 5) Setelah dikunjungi dan disetujui maka sarana dan prasarana akan Dikirm kesekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana Dan prasarana tersebut.³⁶

c. Jenis Pengadaan sarana dan prasarana

Berdasarkan jenisnya, pengadaan sarana prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan pengadaan tanah, bangunan, perabot, buku, alat³⁷

1) Tanah

Pengadaan tanah dapat dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah dan menukar. Menurut Ary H. Gunawan dalam pembelian tanah ada beberapa kegiatan penting yang harus diperhatikan:

- a) Membentuk panitia pembebasan tanah mulai dari 7 instansi, yaitu Agraria, Pemda, Ipeda/Ireda, PU, Camat, Kepada desa dan Depdikbud.



³⁶ Permendiknas No 24 Tahun 2007.

³⁷ *Ibid.*, hlm.116



- b) Honorarium panitia maksimum $\frac{1}{4}\%$ per-orang atau $1\frac{1}{2}$ dari harga taksiran atau maksimal Rp. 1.000.000,-.
- c) Penandatanganan akta jual beli di depan Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atau camat setempat
- d) Pembayaran dilakukan lewat sertifikat tanah di kantor agraria sebagai bukti (KPN).
- e) Menyelesaikan sertifikat tanah di kantor agraria sebagai bukti otentik kepemilikan tanah.

2) Bangunan

Pengadaan bangunan dapat dilakukan dengan cara membangun bangunan baru, membeli bangunan, menyewa bangunan, menerima hibah bangunan dan menukar bangunan. Membangun bangunan meliputi ;

- a) Mendirikan, merenovasi, memperluas dan merubah seluruh atau sebagian bangunan gedung.
- b) Membuat pagar, jalan, pengaspalan, pemasangan pompa dan pengadaan listrik.
- c) Kegiatan pengerjaan tanah yang penimbunan, perataan tanah. Meliputi perbaikan

3) Perabot

Perabotan merupakan sarana pengisian ruangan, misalnya meja, kursi, lemari, rak, filling kabinet, dan lain-lain. Dalam pengadaan perabot sekolah ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain sebagai berikut:

- a) *Antropometri*, artinya pengadaan perabotan dengan memperhitungkan tinggi badan atau ukuran penggal-penggal pemakai (misalnya, siswa dan tenaga pendidik).

- b) *Ergonomis*, yaitu perabot yang akan diadakan tersebut memerhatikan segi kesehatan dan keamanan pemakai. Kenyamanan
- c) *Estis*, yaitu perabot tersebut hendaknya menyenangkan untuk dipakai karena bentuk dan warnanya menarik.
- d) *Ekonomis*, yaitu perabotan bukan hanya berkaitan dengan harga, melainkan merupakan informasi wujud efesiensi dan efektivitas dalam pengadaan dan pendayagunaan³⁸

4) Buku

Pengadaan buku dapat dilakukan dengan cara membeli, menerbitkan sendiri, menerima hibah dan menukarnya. Buku-buku disekolah ada banyak macamnya, seperti buku teks utama, buku pelengkap, buku bacaan nonfiksi dan buku bacaan fiksi

5) Alat

Pengadaan alat-alat disekolah dapat dilakukan dengan cara membeli, membuat sendiri dan menerima bantuan. Alat-alat yang dibutuhkan sekolah berupa alat kantor dan alat pendidikan. Alat kantor adalah alat-alat biasanya digunakan di kantor, misalnya komputer, alat hitung, alat penyimpan uang, alat pendeteksi uang palsu dan alat pembersih. Sementara alat pendidikan adalah alat-alat yang biasa digunakan dalam kegiatan pembelajaran, misalnya alat peraga, alat praktik, alat kesenian dan alat olahraga³⁹



³⁸ Ibid., hlm 117

³⁹ Ibid. hlm.118

d. Kelengkapan Standarisasi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS)

Berdasarkan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pada Pasal 5 ayat (2) menjelaskan sarana yang harus dimiliki oleh tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah terdiri atas bahan Pembelajaran, alat pembelajaran, dan perlengkapan. PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 22 Tahun 2023 ini juga menjelaskan Pada Pasal 25 yakni setiap satuan pendidikan paling sedikit tersedia Sarana dan prasarana dengan ketentuan yakni pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah harus tersedia ruang kelas, ruang Perpustakaan, ruang laboratorium, ruang administrasi ruang kesehatan, tempat beribadah, tempat bermain atau berolahraga, kantin dan toilet⁴⁰

Sementara itu berdasarkan PERMENDIKNAS No 24 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Menjelaskan bahwa Sekolah SMP/MTS sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut :

- 1) Ruang kelas.
- 2) Ruang perpustakaan.
- 3) Ruang laboratorium IPA
- 4) Ruang pimpinan.

⁴⁰ PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 22 Tahun 2023 tentang *Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Hlm.4-12



- 5) Ruang guru.
- 6) Ruang tata usaha.
- 7) Tempat beribadah.
- 8) Ruang konseling.
- 9) Ruang UKS.
- 10) Ruang organisasi kesiswaan.
- 11) Jamban.
- 12) Gudang.
- 13) Ruang sirkulasi.
- 14) Tempat bermain atau berolahraga

Pada setiap sarana tersebut harus dilengkapi dengan sejumlah Sarana pendukungnya.⁴¹

e. Strategi Pengadaan Sarana dan Prasarana

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa cara yang dimaksud sebagai berikut⁴²

1) Pembelian

Pembelian merupakan cara yang umum dilakukan oleh sekolah. Pembelian adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara sekolah menyerahkan sejumlah uang kepada penjual untuk memperoleh sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembelian dapat dilakukan jika kondisi keuangan sekolah memang



⁴¹ PERMENDIKNAS No 24 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MYS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Hlm. 19

⁴² Barnawi & Arifin, *Manajemen Sarana dan prasarana sekolah* (jogjakarta : Ar-Ruzz media, 2012) hlm.60.

memungkinkan. Cara ini merupakan cara yang sangat mudah. Namun, dalam pembelian hendaknya disiasati agar tidak terlalu mahal.

2) Produksi Sendiri

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, sekolah tidak harus membeli. Jika memungkinkan untuk memproduksi sendiri. Sebaiknya memproduksi sendiri. Produksi sendiri merupakan cara pemenuhan kebutuhan sekolah melalui pembuatan sendiri baik oleh guru, siswa, ataupun karyawan. Cara ini akan efektif jika dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya ringan, seperti alat peraga, media pembelajaran, hiasan sekolah, buku sekolah, dan lain-lain. Kegiatan produksi sendiri dapat dilakukan secara massal sehingga bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sekolah sendiri, melainkan pula dapat dijual ke sekolah lain. Kegiatan ini dapat melatih kreativitas dan juga melatih jiwa kewirausahaan.

3) Penerimaan hibah

Penerimaan hibah merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan menerima pemberian sukarela dari pihak lain. Penerimaan hibah dapat berasal dari pemerintah (pusat/daerah) dan pihak swasta. Misalnya, penerimaan hibah tanah. Proses penerimaan hibah harus melalui berita acara penyerahan atau akta serah terima hibah yang dibuat oleh Notaris/PPAT. Akta tersebut harus ditindaklanjuti menjadi sertifikat tanah.

4) Penyewaan

Penyewaan adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memanfaatkan sementara barang milik pihak lain



untuk kepentingan sekolah dan sekolah membayarnya berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Cara ini cocok digunakan jika kebutuhan sarana dan prasarana bersifat sementara.

5) Pinjaman

Peminjaman adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memanfaatkan barang pihak lain untuk kepentingan sekolah secara sukarela sesuai dengan perjanjian pinjam-meminjam. Cara ini cocok untuk kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya sementara atau temporer. Kekurangan dari cara peminjaman ialah dapat merusak nama baik sekolah. Oleh karena itu. Perlu dipertimbangkan efek buruk tersebut.

6) Pendaaurulangan

Pendaaurulangan adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memanfaatkan barang bekas agar dapat digunakan untuk kepentingan sekolah. Jika memang memungkinkan. Cara ini dapat dilakukan untuk kegiatan pembelajaran siswa.

7) Penukaran

Penukaran adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan menukarkan barang yang dimiliki sekolah dengan barang yang dimiliki oleh pihak lain. Cara ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa jika penukaran dilakukan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Sementara itu, sarana dan prasarana sekolah yang ditukar haruslah sarana dan prasarana yang sudah tidak bermanfaat lagi bagi sekolah.



8) Rekondisi/Rehabilitasi

Rekondisi atau perbaikan adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang telah mengalami kerusakan. Perbaikan dapat dilakukan melalui penggantian bagian-bagian yang telah rusak sehingga sarana dan prasarana yang rusak dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya.

Dalam pengadaan sarana dan prasarana harus mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana. Pada umumnya, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melewati prosedur berikut ini.

- 1) Menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana berserta fungsinya.
- 2) Mengklasifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- 3) Menyusun proposal pengadaan sarana dan prasarana. Proposal dari sekolah negeri ditujukan kepada pemerintah melalui dinas terkait dan proposal dari sekolah swasta ditujukan kepada yayasan.
- 4) Menerima peninjauan dari pihak yang dituju untuk menilai kelayakan sekolah memperoleh sarana dan prasarana.
- 5) Setelah ditinjau dan dikunjungi, sekolah akan menerima kiriman sarana dan prasarana yang diajukan.⁴³



⁴³Ibid., hlm.63

Tabel 2.2

Indikator Pengadaan Sarana dan Prasarana di SMP

Ma'had Tahfidz Hayatul Qur'an

No	Indikator
1	Pembelian
2	Pembuatan Sendiri
3	Penerimaan/hibah
4	Penyewaan
5	Pinjaman
6	Pendaurulangan
7	Penukaran
8	Perbaikan/ <i>Rekondis (Rehabilitas)</i>

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Manajemen pembiayaan dalam pengadaan sarana dan prasarana

a) Faktor pendukung

Berikut faktor pendukung dalam implementasi manajemen pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana

1) Terdapat dukungan dari pemerintah

Dukungan pemerintah sangat berarti dalam Meningkatkan kualitas-kualitas Pendidikan anak Indonesia, yang pertama yaitu di Mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal dari gedung sekolah yang layak untuk dipakai belajar mengajar. Hingga sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas Pendukung Pendidikan lainnya. Dan adapun beberapa faktor lain nya yang bisa Menyebabkan kualitas Pendidikan yang ada di





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Indonesia masih sangat rendah yaitu Salah satu nya dari faktor kualitas pengajar yang masih sangat kurang. Pengajar yang Berada di Indonesia, masih dibilang kurang karena lemahnya para pendidik dalam Menggali potensi-potensi murid nya. Dan para pendidik masih memaksakan kehendak Murid untuk mempelajari semua hal tanpa memperhatikan kebutuhan, minat, dan Bakat yang telah dimiliki oleh masing-masing muridnya.

Tanggung jawab pemerintah dalam dunia Pendidikan seharusnya menjadi sebuah Kewajiban yang harus diterapkan dengan cara memberikan atau mengasihkan seluruh keperluan Dasar sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, guru yang profesional, dan tanpa Kebijakan yang sifatnya diskriminatif terhadap anak didik. Dan Pendidikan adalah Tanggung jawab kita bersama para orang tua, masyarakat dan pemerintah, karena Pendidikan tidak bisa atau tidak boleh kita bebaskan kepada salah satu contohnya Dibebankan kepada guru saja ataupun orang tua saja dikarenakan ketiga unsur tersebut menanggung tanggung jawab nya masing-masing⁴⁴

2) Yayasan

Salah satu terdirinya Yayasan untuk Membantu dalam rangkan mencapai tujuan Pendidikan nasional.Maka Yayasan merupakan Suatu badan hukum yang mempunyai tujuan Pada bidang sosial yaitu keagamaan dan Kemanusiaan. Yayasan didirikan tidak dengan Begitu saja, tentunya harus memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan oleh

⁴⁴ Eka Maisara Amalia, *Peran Pemerintah Dalam meningkatkan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan Melalui Efisiensi APBN*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen Vol.1, No.1 Januari 2023

Undang-Undang. Di negara republik Indonesia telah ada undang-Undang yang mengatur mengenai Yayasan yaitu UU No 16 Tahun 2001 dan UU No 28 Tahun 2004⁴⁵

Yayasan memiliki peran penting dalam Memajukan pendidikan, khususnya di Madrasah-madrasah yang sebagian besar Merupakan Madrasah swasta. Fungsi Pembinaan yayasan sudah dilakukan, terutama Dalam pembinaan sumber daya manusia (SDM), pembinaan managerial kepada kepala Dan juga pengelolaan keuangan

3) Komite sekolah

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 56, Komite sekolah/madrasah dimaknai sebagai Lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam Peningkatan mutu pelayanan dengan Memberikan pertimbangan, arahan dan Dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta Pengawasan pendidikan pada tingkat satuan Pendidikan⁴⁶

Selain itu Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah mengatur tentang apa Itu Komite Sekolah, diantaranya adalah Menggalang dana dan sumber daya pendidikan Lainnya dari masyarakat baik Perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia Industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif, serta pengaturan pembiayaan yang ditetapkan oleh sekolah dari pemasukkan dan pengeluaran. Biaya-biaya yang dianggarkan dalam pengembangan proses belajar meliputi menambah dan membangun fasilitas tertentu,



⁴⁵ Undang Undang No.16 tahun 2001 dan Undang Undang No 20 Tahun 2004

⁴⁶ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003

menyumbang tenaga keterampilan tertentu untuk hadir dalam menambah kualitas guru dan Siswa. Bagi lembaga pendidikan bersifat swasta atau mandiri dalam pengelolaan biaya, sumber pembiayaan dilakukan berdasarkan kebutuhan dari pihak sekolah yang diatur peruntukannya dalam merealisasikan RAPBS sekolah, Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan.

4) Transparansi dan akuntabilitas keuangan

Transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan yang sangat erat dalam menjalankan suatu organisasi nirlaba, dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba harus dilakukan dengan transparan, sesuai fakta, dan tidak melebih-lebihkan atau mengurangi informasi yang disampaikan. Dalam pengelolaan organisasi nirlaba sikap amanah harus dilakukan menyangkut kejujuran dan dapat dipercaya, supaya selalu dapat dipercaya untuk menjalankan suatu amanah tersebut

Transparansi dan akuntabilitas menjadi Kewajiban dari pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan Pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi Amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta Pertanggungjawaban tersebut.⁴⁷

b) Faktor penghambat

Berikut faktor penghambat dalam implementasi manajemen pembiayaan dalam pengadaan sarana dan prasarana



⁴⁷ Faris Sabil, *Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan masjid (studi kasus masjid Yogyakarta)*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Volume 11(2) Oktober 2023, hlm. 233-249

1) Keterlambatan pencairan dana

Keterlambatan dalam pencairan dana, khususnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), berdampak signifikan terhadap pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini menghambat kelancaran operasional sekolah dan kualitas pembelajaran

Terganggunya Jadwal Pengadaa hal ini terjadi ketika Keterlambatan pencairan dana menyebabkan penundaan dalam proses perencanaan, pengadaan, dan distribusi sarana prasarana. Akibatnya, sekolah kesulitan memenuhi kebutuhan fasilitas tepat waktu, yang berdampak pada efektivitas proses belajar mengajar

Keterbatasan Operasional Sekolah, dana BOS sering digunakan untuk kebutuhan operasional, termasuk pembayaran honor guru honorer dan pembelian alat tulis. Keterlambatan pencairan memaksa sekolah melakukan penghematan atau mencari sumber dana alternatif, yang dapat mengganggu kelangsungan kegiatan pembelajaran.

Tertundanya Proyek Infrastruktur proyek pembangunan atau rehabilitasi fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas dan laboratorium, dapat tertunda karena dana belum tersedia. Hal ini menghambat peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.⁴⁸

2) Kenaikan harga barang dan bangunan

Kenaikan harga material konstruksi, seperti besi, semen, dan bahan bangunan lainnya, menjadi salah satu penyebab utama. Selain itu,





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

inflasi dan ketidakstabilan ekonomi global atau lokal juga bisa memicu kenaikan biaya proyek. Ketika harga naik, anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi tidak cukup. Akibatnya, proyek bisa terhenti atau harus direvisi, yang tentunya memakan waktu lebih lama⁴⁹

Keterlambatan dalam pengadaan sarana prasarana ini memiliki efek domino. Proyek yang mangkrak atau tertunda membuat fasilitas vital, seperti ruang kelas baru, perpustakaan, atau laboratorium, tidak bisa segera digunakan. Akibatnya, kualitas pembelajaran siswa bisa terganggu. Misalnya, jika jumlah siswa terus bertambah, namun ruang kelas baru tidak selesai, maka kelas yang ada akan semakin padat dan tidak kondusif.

Secara keseluruhan, kenaikan harga bukan sekadar masalah keuangan, tetapi juga masalah manajemen proyek yang terpaksa dirombak total. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan awal, meskipun sudah matang, bisa menjadi rentan terhadap fluktuasi ekonomi yang tak terduga.

B. Kajian Relevan

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di SMP Ma'had Tahfidz Hayatul Qur'an Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, penelitian ini berkaitan tentang manajemen pembiayaan pendidikan dalam pengadaan sarana prasarana oleh karena itu, selain berdasarkan pada survei dan data data yang diperoleh, penulis juga berpijak pada kajian penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mencari informasi dan menganalisis bahwa penelitian penulis berbeda dari penelitian terdahulu.

⁴⁹ Akdon, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 40

1. Mirnawati dalam skripsinya yang berjudul “Perencanaan dan Pengadaan Sarana Prasarana pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir” Penelitian ini mendeskripsikan tentang Perencanaan dan Pengadaan Sarana prasarana, melalui faktor pendukung dan penghambat Perencanaan dan pengadaan sarana prasarana, hasil penelitian Mirnawati, perencanaan di lakukan dengan menyusun daftar kebutuhan , dan evaluasi kebutuhan sebelum nya, kepala madrasah dan kepala bidang sarana prasarana dalam mengadakan sarana prasarana melakukan cara membeli,produksi sendiri menerima hibah ,penyewaan dan membangun bangunan baru⁵⁰

Persamaan dari penelitian penulis dengan Mirnawati yaitu sama sama membahas tentang pengadaan sarana dan prasarana,namun fokus penelitian yang di tulis Mirnawati fokus pada faktor penghambat dan pendukung perencanaan dan pengadaan sarana prasarana

Sedangkan perbedaan penelitian yang penulis teliti ini hanya fokus pada manajemen pembiayaan dalam pengadaan sarana prasarana serta sumber pembiyaan pengadaan sarana prasarana.

2. Aslan dalam skripsinya yang berjudul “Kontribusi Komite Sekolah Dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Di MTS Nurul Ikhsan Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir,hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang kontribusi komite sekolah dalam pengadaan sarana prasarana melalui pembelian, penyewaan , pendeurualangan. Kendala yang di hadapi komite sekolah adalah kurang nya pemahaman dari beberapa sekolah dalam hal

⁵⁰ Mirnawati, *Perencanaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri hilir*, Universitas Islam Indragiri, Fakultas Ilmu Agama Islam, (Kabupaten Indragiri hilir,2024) hlm.251-253



pengadaan sarana prasarana sehingga kurang bersinergi, kurangnya kekompakan para warga sekolah dalam hal pengadaan dalam sifatnya gotong royong atau yang membuat sendiri dari bahan daur ulang sehingga kurang berjalan dengan baik, faktor dukungannya dapat dukungan penuh dari warga sekolah sehingga menjadi semangat komite sekolah dalam mengadakan sarana prasarana⁵¹

Persamaan penelitian yang dilakukan Aslani dengan peneliti yaitu tentang pengadaan sarana prasarana, fokus penelitian yang dilakukan Aslani mengenai komite sekolah dalam upaya pengadaan sarana prasarana.

Sedangkan perbedaan penelitian yang ditulis peneliti ini berfokus pada manajemen pembiayaan dalam pengadaan sarana dan prasarana serta sumber pembiayaan Pengadaan Sarana Prasarana.

3. Nurul Afifah Ainun dalam jurnalnya yang berjudul pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) dalam meningkatkan kelengkapan prasarana sekolah di SD negeri 006 teluk pandan kecamatan teluk pandan, Hasil analisis menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam mengelola dana BOSP, dimulai dari tahap perencanaan yang melibatkan seluruh guru dalam rapat evaluasi kebutuhan. Proses ini memastikan bahwa alokasi anggaran didasarkan pada prioritas kebutuhan sekolah, khususnya dalam peningkatan Prasarana yang mendukung kualitas pembelajaran.

Penggunaan dana BOSP yang terfokus pada pembangunan ruang kelas baru dan pemenuhan fasilitas pembelajaran menunjukkan komitmen

⁵¹ Aslan, *Kontribusi Komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana di Mts Nurul Ikhlas Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir*, Universitas Islam Indragiri Fakultas Ilmu Agama Islam (Kabupaten Indragiri Hilir, 2023) helm. 78-79



sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pelaksanaan dana BOSP di SD Negeri 006 Teluk Pandan juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas. Sekolah berupaya untuk mematuhi prosedur administrasi yang ditetapkan, meskipun menghadapi beberapa tantangan seperti kompleksitas birokrasi dan fluktuasi harga barang. Upaya sekolah dalam mengoptimalkan penggunaan dana BOSP terlihat dari dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan prasarana⁵².

Persamaan dari penelitian penulis dengan Nurul Afifah Ainun yaitu sama sama membahas tentang tata kelola pembiayaan dalam mengoptimalkan penggunaan dana prasarana.

Perbedaan terdapat pada manajemen pembiayaan nya sedangkan Nurul Afifah Ainun menekankan pada (BSOP) terhadap peningkatan prasarana sedangkan peneliti menekankan pada pengadaan sarana dan prasarana

4. Wahdana Fadlia dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di MTs Islamiah Suluh Medan", diketahui bahwa sarana dan prasarana di MTs Islamiah Suluh Medan sudah tergolong optimal. Namun, tetap diperlukan upaya pemeliharaan agar fasilitas tersebut dapat berfungsi dengan baik. Manajemen pembiayaan untuk pemeliharaan dilakukan secara transparan. Sumber dana yang digunakan berasal dari uang SPP, bantuan dana dari pihak luar, dan Dana BOS. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk membiayai program sekolah,



⁵² Nurul Afifah Ainun, *Pengelolaan dana bantuan Operasional (BOSP) dalam meningkatkan kelengkapan prasarana sekolah di SD Negeri 006 Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan*, (jurnal pelita negeri belantara, 2025), <https://jurnalpelitanegribelantara.com/index.php/JPMP/article/view/265/187>

seperti pemeliharaan sarana prasarana, pembayaran gaji guru, serta belanja rutin barang dan jasa⁵³

Persamaan dari penelitian yang dilakukan dengan peneliti yaitu sama sama membahas pentingnya manajemen pembiayaan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan yang berfokus pada sarana prasarana

perbedaan penelitian ini yaitu menitik beratkan pada pemeliharaan sarana prasarana sedangkan penulis menitikberatkan pada pengadaan sarana dan prasarana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Universitas Islam Indragiri

⁵³ Wahdana Fadlia. *Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di MI's Islamiyah Suluh Medan* (Medan: Universitas Suluh Medan, 2018), h. 58-59